



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK, RETRIBUSI DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Oleh

**Sulmi Muammar Rizqi
NIM 110810101038**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK, RETRIBUSI DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Sulmi Muammar Rizqi
NIM 110810101038

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada ;

1. Ibunda Sulik Ami dan Ayahanda Ardiman tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Kakakku Ulfi Rizka Utami, yang telah memberikan motivasi, dukungan moral, dan semua pengorbanan selama ini;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater yang aku banggakan UNIVERSITAS JEMBER.

MOTTO

”Hai orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah SWT dan carilah jalan yang
medekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu
mendapatkan keberuntungan”

(Q.S Al-Maidah)

“...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)
dan ingat kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap...”

(QS. Al Insyiroh : 6-8)

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlailah tanpa lelah sampai
engkau meraihnya” ; (Nidji-Laskar Pelangi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Sulmi Muammar Rizqi

NIM : 110810101038

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo.**

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 5 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Sulmi Muammar Rizqi
NIM 110810101038

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK, RETRIBUSI DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

Oleh

Sulmi Muammar Rizqi
NIM 110810101038

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Aisah Jumiati, SE, MP

Dosen Pembimbing II : Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Analisis Efektivitas Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo

Nama Mahasiswa : Sulmi Muammar Rizqi

NIM : 110810101038

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 22 Oktober 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Aisah Jumiati, SE, MP
NIP 19680926 199403 2 002

Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si
NIP 19830116 200812 2 001

Ketua Jurusan
IESP

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK, RETRIBUSI DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sulmi Muammar Rizqi
NIM : 110810101038
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 13 November 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si (.....)
NIP. 19700206 199403 1 002
2. Sekretaris : Drs. Petrus Edi Suswandi M.P (.....)
NIP. 19550425 198503 1 001
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindrartin M.Kes (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001
4. Pembimbing 1 : Aisah Jumiati S.E., M.P (.....)
NIP. 19680926 199403 2 002
5. Pembimbing 2 : Fivien Muslihatinningsih S.E., M.Si (.....)
NIP. 19680926 199403 2 002

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

Foto 4 X 6

warna

Dekan,
Dr. Moehammad Fathorrazi, Msi.
NIP. 19630614 199002 1 001

*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak, Retribusi Dan
Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Kota Probolinggo*

Sulmi Muammar Rizqi

*Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah kota probolinggo. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif berupa rumus efektivitas dan kontribusi dengan menggunakan data sekunder tahun 2010 hingga tahun 2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas terbesar ditempati variabel pajak daerah dan efektivitas terkecil ditempati variabel pengelolaan kekayaan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya pemerintah Kota Probolinggo dalam melakukan pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan kontribusi terbesar ditempati variabel retribusi daerah dan kontribusi terkecil ditempati variabel pengelolaan kekayaan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa minimnya sumbangsih dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan diharapkan pemerintah Kota Probolinggo meningkatkan sumber daya modal pada perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Kota Probolinggo.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah

The Analysis of the Effectiveness and Contribution of Taxes, Levies and the Management of Local Wealth of Probolinggo's Local Revenue

Sulmi Muammar Rizqi

*Department of Economic and Development Study, the Faculty Economics,
Jember University*

ABSTRAC

The research aims to analyze the effectiveness and measure how much the contribution of local taxes and levies, and also to manage the local wealth of Probolinggo's local revenue. The research method uses the quantitative descriptive analysis which uses the effectiveness and contribution formula by using secondary data taken from 2010 to 2014 that is obtained from Department of revenues, financial management and asset. The result shows that the largest effectiveness is the variable of local taxes and the smallest effectiveness is the variable of local wealth management. It shows that the Probolinggo's government is less effective in managing the local wealth. Meanwhile, the largest contribution is the variable local levies and the smallest contribution is the variable of local wealth management. It shows that the contribution from local wealth management is still low. It is expected that Probolinggo could increase the capital resources at the local companies in the Probolinggo itself.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Taxes, Levies, Local Wealth Management and Local Revenue*

RINGKASAN

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo; Sulmi Muammar Rizqi, 110810101038; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Kota Probolinggo menurut piramida penduduk mempunyai jumlah penduduk usia produktif 66,61% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif. Berarti terlihat bahwa perekonomian Kota Probolinggo banyak bergantung pada kemampuan SDM karena probolinggo memiliki potensi SDM yang memadai. Namun kemampuan SDM yang memadai ini tidak seperti yang diharapkan. Masih kurangnya efektivitas dan kontribusi pada pajak dan retribusi terutama pada pengelolaan kekayaan daerah yang masih tergolong sangat rendah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah, sehingga memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka, sedangkan penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari instansi dan pihak-pihak terkait dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus efektivitas dengan membandingkan realisasi dan target, dan juga menggunakan rumus kontribusi untuk mencari besarnya sumbangsih variabel terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui rumus efektivitas dan kontribusi, diketahui bahwa efektivitas dan kontribusi antar variabel bervariasi. Ada naik setiap tahunnya dan ada juga yang turun disetiap tahunnya. Bahkan ada juga yang masih tergolong sangat rendah. Setelah melalui perhitungan dengan rumus

efektivitas dan kontribusi diketahui bahwa efektivitas tertinggi ditempati oleh variabel pajak daerah dan efektivitas terendah ditempati oleh variabel pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan kontribusi tertinggi ditempati oleh variabel retribusi daerah dan kontribusi terendah ditempati oleh variabel pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya sumbangan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan diharapkan pemerintah Kota Probolinggo lebih meningkatkan sumber daya modal dan sadar akan pentingnya pengelolaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.



PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Ibu Aisah Jumiati, SE, MP selaku pembimbing I dan Ibu Fivien Muslihatinningsih, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna/berarti bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin., M.Kes selaku ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta para staf dan jajarannya.
4. Para dosen penguji penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zainuri, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang banyak memberikan pengarahan dan motivasi selama saya menjalani studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
7. Ibunda Sulik Ami dan Ayahanda Ardiman tersayang, atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti yang sangat besar dan tak ternilai harganya bagi saya dan atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT akan membalasnya.

8. Kakakku Ulfi Rizka Utami atas kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti yang sangat besar bagi saya.
9. Sahabat-sahabat kost Mukhammad Harfat Kholid, Adimas Putra Firdaus, Kharis Septina Liftyawan dan Ahmad Sodiq terimakasih atas untaian doa, dukungan, motivasi yang tiada henti yang sangat besar dan untuk kebersamaan di setiap hari-hari yang indah.
10. Sahabat-sahabat “Paskibra Universitas Jember ‘11”, terimakasih telah mengajarkan indahnya kebersamaan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Kawan-kawan seangkatanku “IESP 2011” terutama kepada Ave, Reggi Irfan, Andryan, Daddy, Sholeh, Iqbal, Rofi, Dany, Desta, Dian yang mengajarkan indahnya perbedaan dalam kebersamaan.
12. Teman-teman seperjuanganku KKN 26 dan KKN 201, terimakasih untuk kenangan-kenangan terindah dan petualangan-petualangan seru yang tidak akan terlupakan.
13. Teman-teman kontrakan W13 Kiki Afiarto, Reza Affandi, I Nyoman Abyasa, Susetyo Ari, Mahrobi Anggra, Septyarizaldi, Fredy Vidianto, dan Fahmi Faturrozi, terimakasih untuk doa dan bantuannya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Jember, 5 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Pertumbuhan	8
1 Teori Pertumbuhan Klasik.....	8
2 Teori Pertumbuhan Harrord-Domar	11
3 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik.....	11
2.1.2 Teori Pembangunan	12
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	13
1 Pajak Daerah.....	15
2 Retribusi Daerah.....	17
3 Pengelolaan Kekayaan Daerah	18
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Konseptual	21
BAB 3. METODE PENELITIAN	23
3.1 Rancangan Penelitian	23
3.1.1 Jenis Penelitian	23
3.1.2 Unit Analisis	23
3.1.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Jenis Data.....	24
3.2.2 Sumber Data	24
3.3 Metode Analisis Data	24
3.3.1 Metode Deskriptif Kuantitatif.....	24

3.3.2 Efektivitas	25
3.3.3 Kontribusi	26
3.4 Definisi Operasional	28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum.....	29
4.1.1 Keadaan Geografis Kota Probolinggo	29
4.1.2 Kependudukan di Kota Probolinggo.....	30
4.1.3 Indikator Pembentuk Pendapatan Asli Daerah	31
1 Pajak Daerah.....	33
2 Retribusi Daerah	34
3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	35
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Efektivitas Pajak Daerah.....	36
4.2.2 Efektivitas Retribusi Daerah.....	37
4.2.3 Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	38
4.2.4 Kontribusi Pajak Daerah.....	39
4.2.5 Kontribusi Retribusi Daerah	40
4.2.6 Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah	41
4.3 Pembahasan	42
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50

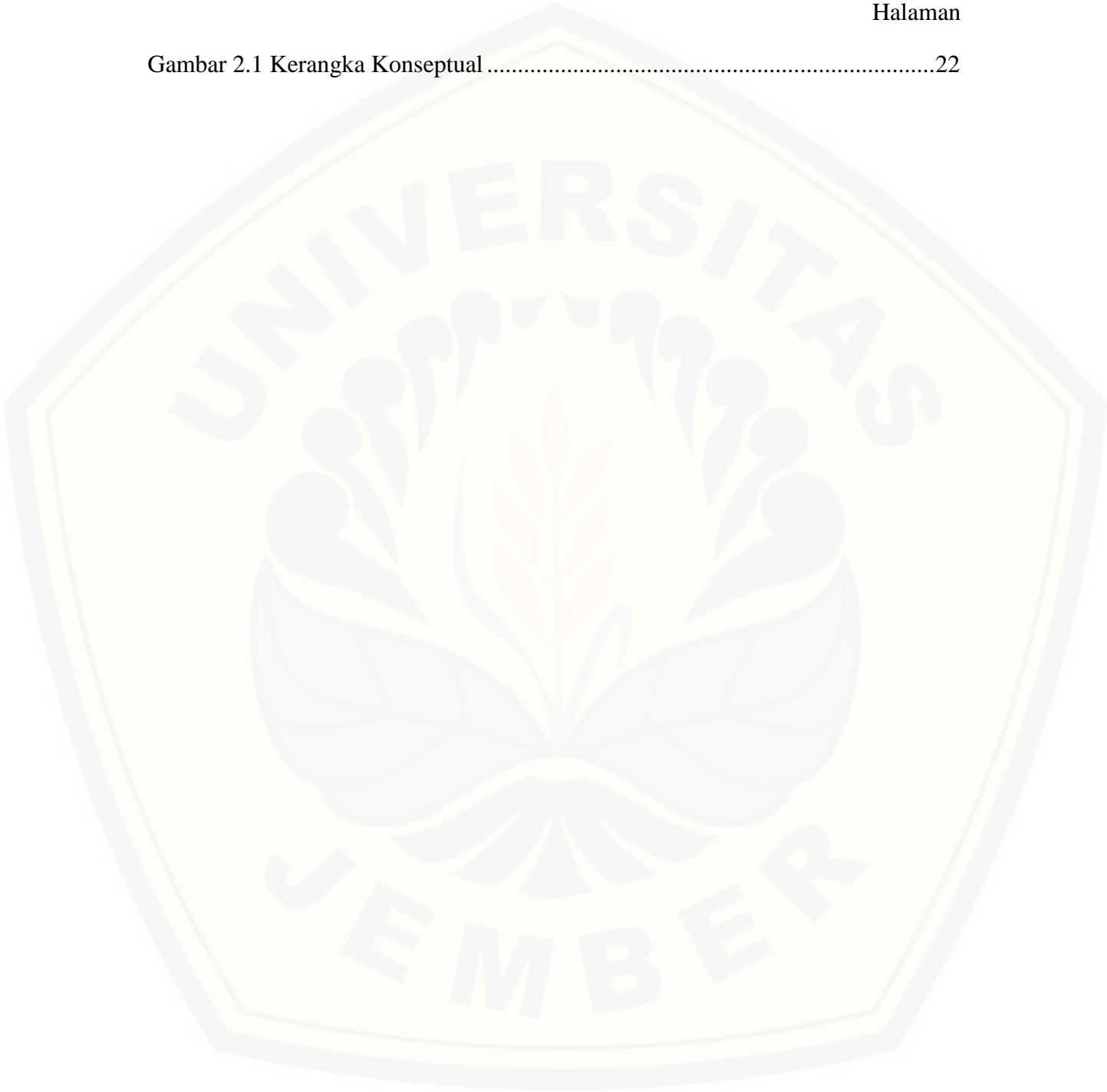
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2009-2013	3
Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Probolinggo	4
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas	26
Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi	27
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Probolinggo.....	31
Tabel 4.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo ...	32
Tabel 4.3 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Probolinggo ..	33
Tabel 4.4 Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Probolinggo	34
Tabel 4.5 Perkembangan Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.....	35
Tabel 4.6 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo	37
Tabel 4.7 Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo	38
Tabel 4.8 Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo	39
Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo	40
Tabel 4.10 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo	41
Tabel 4.11 Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo	42

DAFTAR GAMBAR

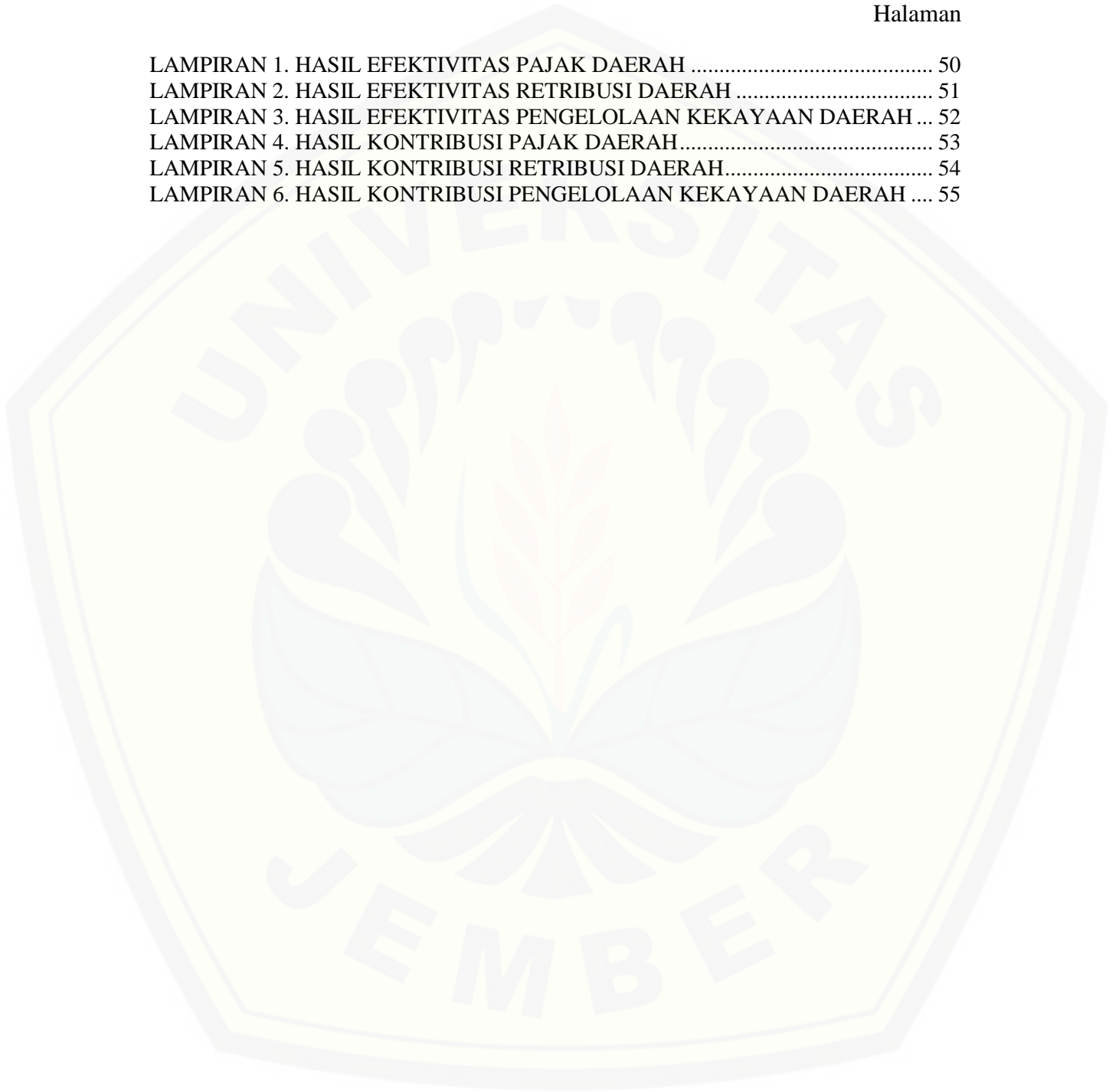
Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual22



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. HASIL EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH	50
LAMPIRAN 2. HASIL EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH	51
LAMPIRAN 3. HASIL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH ...	52
LAMPIRAN 4. HASIL KONTRIBUSI PAJAK DAERAH.....	53
LAMPIRAN 5. HASIL KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH.....	54
LAMPIRAN 6. HASIL KONTRIBUSI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	55



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara yang sedang berkembang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional. Hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan, karena kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan. Pembangunan ekonomi juga bertujuan agar rakyat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata serta untuk mencapai misi atau cita-cita bangsa yang belum tercapai. Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional, yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Todaro, 2006:124).

Pembangunan ekonomi tidak berhenti pada saat sumber daya manusia belum mewujudkan misi atau cita-cita yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembangunan identik dengan pertumbuhan yang artinya jika pembangunan di suatu negara terwujud, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga meningkat. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Maka dari itu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus diarahkan dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain (Kuncoro, 2004).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar kelima di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 250 juta orang pada tahun 2012 dalam kata lain Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar yang menjadi potensi besar untuk menggerakkan pembangunan (Subagiarta, 2012:14). Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, permasalahannya tidak hanya fokus pada perkembangan pendapatan secara

riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya masalah percepatan pertumbuhan ekonomi, dan masalah pemerataan pendapatan.

Penerapan otonomi daerah dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alasan yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah tidak meratanya pembangunan di daerah yang menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan perekonomian dengan mengola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal (Situngkir, 2009:18).

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Mardiasmo, 2002). Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002), antara lain tingginya tingkat kebutuhan daerah sehingga belum diketahuinya potensi PAD. Maka kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah agar mencapai tujuan negara yakni pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD (Mulyadi, 2011). Peningkatan PAD merupakan suatu usaha daerah yang digunakan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah atas pemerintah pusat. Beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak mempunyai peranan besar dalam membiayai kebutuhan negara (Vina.dkk, 2010). Pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga (Ismail, 2011). Pemerintah daerah

diharuskan untuk mengatur secara adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang menyangkut hak-hak rakyatnya dengan kata lain harus adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh rakyatnya serta memaksimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang hasilnya nanti dapat menunjang peningkatan pendapat asli daerah. Untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah juga harus mengalokasikan hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Perkembangan perekonomian Kota Probolinggo tercermin dari perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama 2009-2013.

Tabel 1.1 Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2009-2013

Uraian (1)	2009 (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012* (5)	2013** (6)
1. PDRB ADHB (juta Rp)	4.230.401	4.768.000	5.262.373	5.880.992	6.674.888
2. PDRB ADHK 2000 (juta Rp)	1.905.227	2.021.827	2.154.855	2.303.404	2.460.221
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	6,12	6,58	6,89	6,81

Sumber : BPS Kota Probolinggo

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Selama 2009-2013 PDRB atas dasar harga berlaku selalu menunjukkan peningkatan yaitu antara 10,46 persen sampai 13,26 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi dua faktor yaitu peningkatan produksi barang dan jasa dan pengaruh dari perubahan harga. Peningkatan tertinggi 13,26 persen terjadi pada tahun 2013. Kenaikan harga BBM pada tahun 2013 memacu peningkatan PDRB. Pada tahun 2009 PDRB Kota Probolinggo atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 4.230.400 juta, selama kurun waktu lima tahun meningkat menjadi Rp. 6.674.888 juta.

Berdasarkan harga konstan, besarnya PDRB Kota Probolinggo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 masing-masing sebesar Rp. 1.905.226,66 juta (2009), Rp. 2.021.826,54 juta (2010), Rp. 2.154.901,80 juta (2011), Rp. 2.303.403,94 juta (2012) dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 2.460.221 juta. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 selama lima tahun tersebut, nampak bahwa setiap tahun nilai

tersebut menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nilai produksi sektoral tanpa ada pengaruh dari perubahan harga, oleh karena itu peningkatan tersebut digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir sebesar 5,35 persen (2009); 6,12 persen (2010); 6,58 persen (2011); 6,89 persen (2012); dan 6,81 persen pada tahun 2013 (BPS Kota Probolinggo).

Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Sektor	2009	2010	2011	2012*	2013**
1. Pertanian	375.497	370.379	355.214	371.860	393.243
2. Pertambangan dan Pengalihan	49	48	53	55	56
3. Industri Pengolahan	606.440	655.549	700.548	765.314	876.326
4. Listrik, gas dan air bersih	45.607	51.436	57.290	61.740	67.336
5. Bangunan	41.209	51.026	57.896	73.581	92.633
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1.732.097	2.031.353	2.317.139	2.661.475	3.062.278
7. Pengangkutan & Komunikasi	641.368	684.642	747.906	810.695	910.624
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	278.258	321.827	366.616	414.571	481.890
9. Jasa-jasa	509.875	601.703	659.709	733.883	790.503

Sumber: BPS Kota Probolinggo

Keterangan: *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Sektor-sektor yang dominan dalam perkembangan perekonomian Kota Probolinggo adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran masih menjadi sektor yang paling berperan dalam perekonomian di Kota Probolinggo pada tahun 2013 dengan nilai tambah sebesar Rp. 3.062.278 juta. Dalam lima tahun terakhir nilai tambah sektor ini lebih dari empat puluh persen dari nilai PDRB serta menunjukkan kecenderungan meningkat.

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor kedua terbesar dengan nilai tambah sebesar Rp. 910.624 juta pada tahun 2013, tetapi selama tahun 2009 sampai tahun 2013 kontribusinya menunjukkan tren yang menurun. Sedangkan sektor ketiga terbesar dalam perekonomian Kota Probolinggo yaitu sektor Industri Pengolahan. Selama tahun 2009 sampai 2012 menunjukkan tren yang menurun akan tetapi pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan dengan nilai tambah sebesar Rp. 876.325 juta. Sektor keempat, kelima dan keenam yang berperan dalam perekonomian Kota Probolinggo yaitu sektor Jasa-jasa, sektor Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Pertanian, dengan nilai PDRB pada tahun 2013 masing-masing sebesar Rp. 790.503 juta, Rp. 481.890 juta dan Rp. 393.243 juta (BPS Kota Probolinggo).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sektor yang dominan pada perekonomian Probolinggo adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, hotel dan restoran masuk dalam pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir. Sedangkan retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendukung kedua dan ketiga peningkatan pendapatan asli daerah Kota Probolinggo. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa peranan terbesar terdapat pada sektor tersier. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Probolinggo sangat tergantung pada kemampuan SDM. Karena itu untuk memperkuat pondasi perekonomian Kota Probolinggo harus dengan jalan meningkatkan kualitas SDM dengan cara meningkatkan pengetahuan dan Ketrampilan.

Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang mana hasilnya tidak hanya untuk pembangunan daerah tersebut, tetapi juga digunakan sebagai peningkatan kualitas, sarana dan prasarana pada semua sektor. Dengan adanya peningkatan kualitas, sarana dan prasarana kemungkinan juga akan meningkatkan daya tarik konsumen baik dari dalam negeri maupun mancanegara sehingga pendapatan asli

daerah akan meningkat pula. Dengan demikian pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kewenangannya sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah disetiap sektor demi kemajuan bersama, serta meningkatkan sumber daya modal pada perusahaan-perusahaan daerah demi terkelolanya kekayaan daerah. Maka dengan latar belakang diatas, penulis membuat karya ilmiah dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah:

1. Seberapa besar efektivitas penarikan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo?
2. Seberapa besar kontribusi penarikan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penarikan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penarikan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Probolinggo;

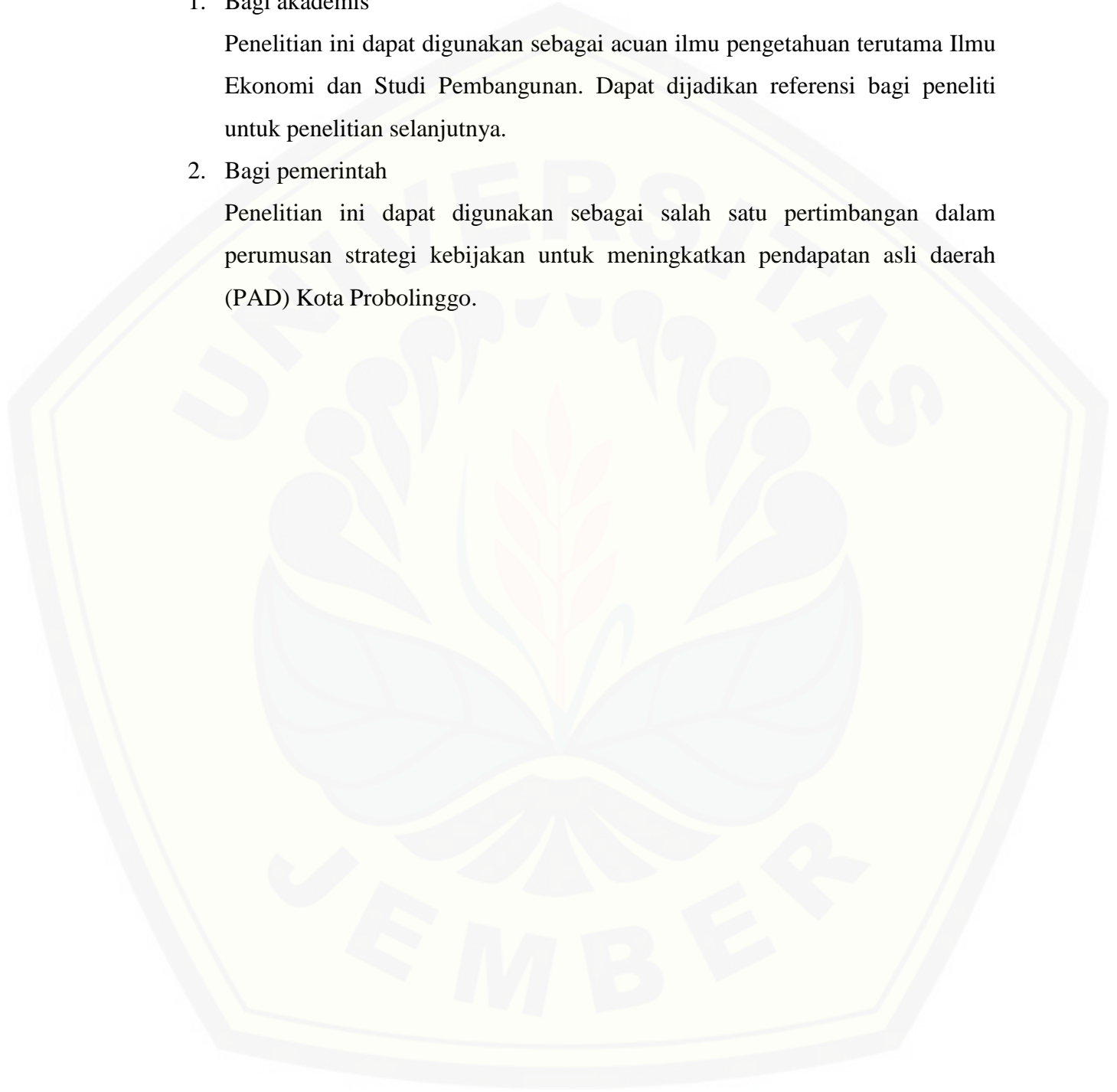
1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan strategi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Probolinggo.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan

Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets dimana pertumbuhan ekonomi dilihat melalui kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi terhadap penduduknya. Pertumbuhan ekonomi juga dinyatakan dalam bentuk: 1) GNP atau NNP nyata total dengan berlangsungnya waktu, 2) GNP atau NNP nyata perkapita dengan berlangsungnya waktu (Winardi, 1983:183-184).

Menurut Rostow proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya, yaitu:

1. Masyarakat tradisional (the traditional society)
2. Pra syarat untuk lepas landas (the preconditions for take-off)
3. Lepas landas (the take-off)
4. Gerakan ke arah kedewasaan (the drive to maturity)
5. Masa konsumsi tinggi (the age of high massconsumption)

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan (Arsyad, 1999).

a. Adam Smith

Adam Smith bukan saja terkenal sebagai pelopor ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ahli ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pembangunan, seperti dapat dilihat

dari judul bukunya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez-faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.

Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan di antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi yang bertambah tinggi dan pasar yang bertambah luas akan menciptakan teknologi dan mengadakan inovasi (pembaruan). Maka, perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan dengan demikian dari masa ke masa pendapatan per kapita akan terus bertambah tinggi.

b. David Ricardo

Pandangan Smith mengenai pola proses pembangunan yang sangat optimis di atas sangat bertentangan dengan pendapat Ricardo dan Malthus, yang mempunyai pandangan yang lebih pesimis tentang akhir dari proses pembangunan dalam jangka panjang. Kedua ahli ekonomi klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *stationary state* atau suatu keadaan di mana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Menurut Smith, yang belum menyadari hukum *hasil lebih yang makin berkurang*, perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena ia akan memperluas pasar. Sedangkan menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu

satu generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. pada tingkat ini pekerja akan menerima upah yang sangat minimal, yaitu upah hanya mencapai tingkat cukup hidup.

Menurut Ricardo, pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak. Akibatnya para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung kepada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan tingkat pembentukan modal yang tinggi pula. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan produksi dan pertambahan permintaan tenaga kerja.
2. Jumlah tenaga kerja bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah ini mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan adalah tanah yang mutunya lebih rendah. Akibatnya hasil tambahan yang diciptakan oleh seorang pekerja (produk marjinalnya) akan semakin kecil, karena lebih banyak pekerja yang digunakan. Dengan terjadinya pertambahan penduduk yang terus-menerus, sewa tanah makin lama makin merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh pendapatan nasional dan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Dorongan untuk mengadakan pembentukan modal menurun dan akan menurunkan permintaan atas tenaga kerja.
3. Sesudah tahap tersebut, tingkat upah akan menurun dan pada akhirnya akan berada pada tingkat yang minimal. Pada tingkat ini perekonomian akan mencapai *stationary state*. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

2. Teori Pertumbuhan Harrord-Domar

Teori pertumbuhan Harrord-Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrord. Domar mengemukakan teori pertama kalinya pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrord telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori Harrord-Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth* yang artinya pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal dengan asumsi yang digunakan yaitu (Sumaatmaja, 1981):

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang modal digunakan secara penuh.
2. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional.
3. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save) besarnya tetap dan rasio modal output (capital-output ratio) tetap.
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini berkembang sejak pertengahan tahun 1950-an berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis mengembangkan teori tersebut adalah Solow. Model Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi dalam mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu dan mengasumsikan bahwa proses produksi memiliki skala pengembalian konstan (Mankiw, 2003).

Dalam analisis Neo-Klasik, permintaan masyarakat ekonomi tergantung kepada pertambahan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan

teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang telah menjadi dasar dalam analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas barang-barang modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa. Dengan demikian menurut teori Neo-Klasik, sampai di mana perekonomian akan berkembang, tergantung kepada penambahan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi.

2.1.2 Teori Pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang mencerminkan perubahan total suatu masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, pembangunan ekonomi secara teoritis diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Menurut Jhingan (2010), persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materiil harus muncul dari masyarakat;
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan;
3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer;
4. Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan dikatakan sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi;

5. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian;
6. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan;
7. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi pembangunan.

Arsyad mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ditujukan secara utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintah serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama untuk pembiayaan kegiatan rutin serta pembangunan daerah, merupakan sumber yang harus ditingkatkan peranannya dalam rangka menutup peningkatan kebutuhan akan biaya pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber

PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh daerah diantaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah disetiap sektor yang berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. **Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah**

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.**

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-undang (Kurniawan, 2010).

1. Pajak Daerah

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi).

Definisi tentang pajak yang diberikan para ahli dibidang keuangan negara, ekonomi, maupun hukum mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. P. J. A. Andriani merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo, 2003).

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H. dalam Dasar-dasar *Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* merumuskan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (perlihatkan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1991).

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Prakosa (2003) menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota / Kabupaten terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir.

2. **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah (PAD) menempati peringkat kedua setelah pajak daerah, dan merupakan sumber utama pendapatan daerah. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayarannya pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi.

Prakosa (2005) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pemungut retribusi. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Sesuai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, maka Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam hal ini langkah pemerintah dalam pengelolaan perekonomian Negara dengan membentuk Perusahaan Negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan Negara dengan Saham Negara pada Perusahaan Negara seluruhnya bersumber dari Kekayaan Negara yang dipisahkan. Dipisahkan dalam arti pengelolaan kekayaan Negara tersebut tidak dilakukan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan Negara (APBN).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai referensi, dan juga sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah:

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Jurnal: Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati	Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota	Regresi Linier Berganda	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah lebih

	Vol. 5 No. 3 2013	di Provinsi Bali		besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2	Jurnal: Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto dan Nila Firdausi Nuzula Vol. 10 No. 1 2014	Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)	Deskriptif	Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 97,77%. Tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Blitar kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah.
3	Jurnal: Khairunnisa Vol. 22 No. 3 2011	Pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) (studi kasus: Kota Bandung)	Analisis SWOT	Strategi yang diambil untuk meningkatkan PAD Kota Bandung adalah strategi strength opportunity (SO), strateginya adalah: a. meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran Kota Bandung dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi dengan kualitas promosi yang lebih efektif; b. memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah Kota Bandung untuk menarik wisatawan domestik dan internasional; c. pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemungutan pajak hotel dan pajak restoran; d. meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, melalui penyuluhan terhadap wajib pajak.
4	Jurnal: Nariana dan Siti Khairani	Analisis kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota	Regresi Linier Sederhana	Kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.

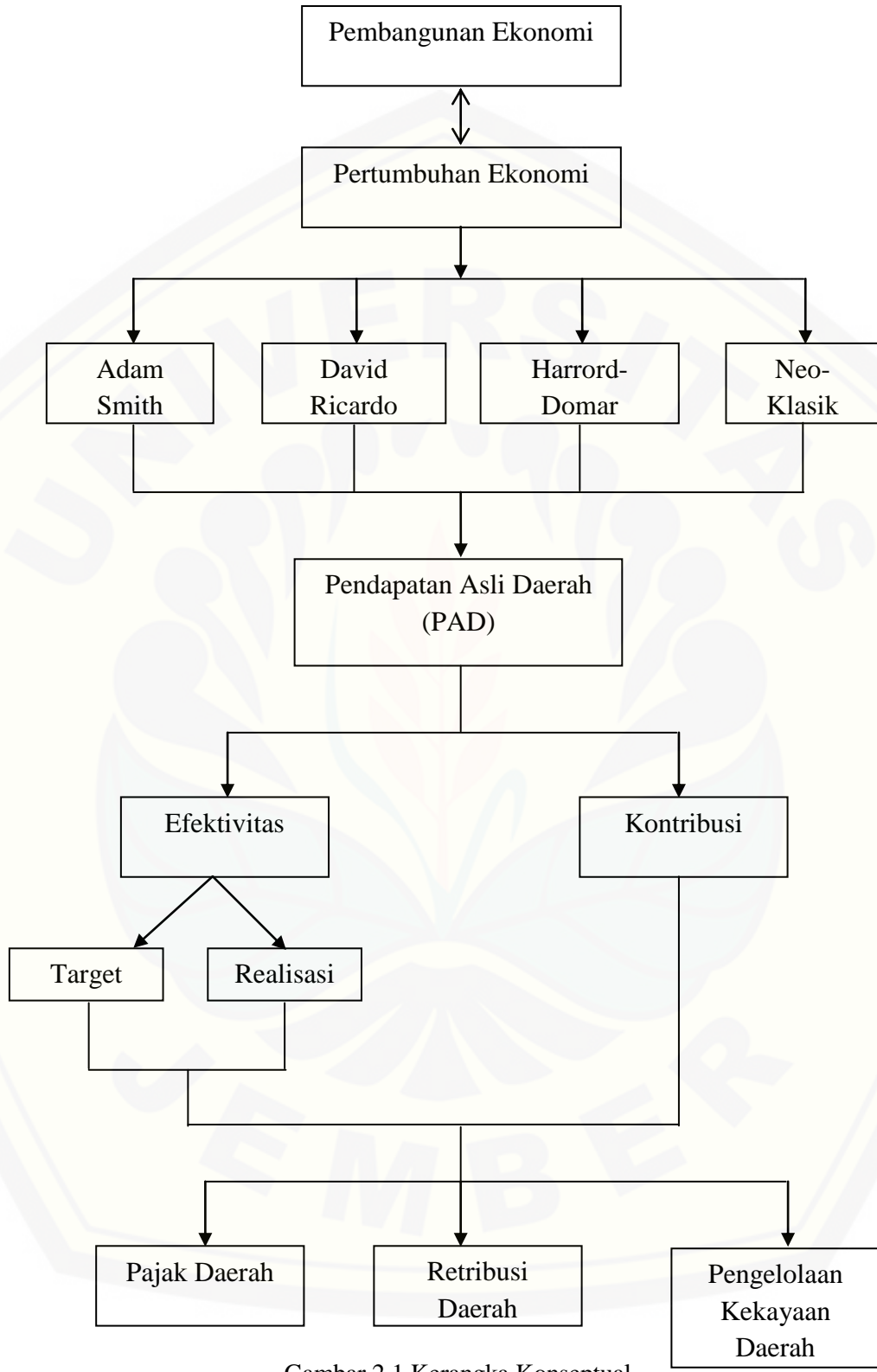
		Palembang		
5	Jurnal: Rahayuningsih Vol. 6 No. 16 2009	Analisis efektivitas pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi	Analisis Deskriptif Kualitatif dan Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas pajak reklame dikatakan tidak efektif karena dalam penghitungannya pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak daerah atau adanya penambahan wajib pajak daerah baru dan juga dikarenakan objek pajak dihitung berdasarkan asumsi terendah atau terkecil dari dasar perhitungan jual objek pajak.

Pada Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu dapat diketahui perbedaan dan persamaannya dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu mencari efektivitas dan kontribusi pajak parkir, pajak reklame, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu sedangkan penelitian sekarang mencari efektivitas dan kontribusi keseluruhan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mencari efektivitas dan kontribusi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian terdahulu adalah efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 97,77%. Tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Blitar kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap PAD. Kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap PAD Kota Palembang dan Efektivitas pajak reklame dikatakan tidak efektif. Hasil dari penelitian sekarang yaitu tingkat efektivitas pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah dikatakan efektif bahkan sangat efektif karena persentasenya lebih dari 100%. Sedangkan kontribusi pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah masih dikatakan kurang karena persentasenya dibawah 20%. Namun pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah mencapai 65%.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah ada dan dilatarbelakangi oleh penelitian terdahulu, maka dapat disusun perumusan kerangka konseptual sebagai berikut:

Pada Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat berarti pembangunan ekonomi dikatakan berhasil. Teori pertumbuhan ekonomi dibedakan oleh beberapa tokoh, yaitu teori Adam Smith, David Ricardo, Harrod-Domar dan Neo-Klasik. Keempat teori tersebut mempunyai hasil pemikiran yang berbeda-beda dan disimpulkan jika pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah (PAD) di negara tersebut juga meningkat. Ada beberapa variabel yang menentukan pendapatan asli daerah (PAD), disini penulis mengambil pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Seperti yang kita ketahui, hasil pungutan pajak daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah masuk ke dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dari beberapa variabel tersebut dapat dicari besarnya efektivitas dengan membandingkan target dan realisasinya, dan juga dapat cari besarnya kontribusi antar variabel terhadap PAD Kota Probolinggo.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:8): “penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian”. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan metode kuantitatif digunakan menganalisis pengukuran secara kuantitas terhadap variabel yang dikaji atau dianalisis.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah di Kota Probolinggo yang dipengaruhi oleh variabel seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2010-2014 karena melihat pada data PDRB Kota Probolinggo sektor yang paling dominan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, sektor tersebut masuk dalam pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

3.1.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area penelitian ini berlangsung. Lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu di Kota Probolinggo. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo mengalami peningkatan serta PDRB yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Seperti yang kita ketahui bahwa hotel dan restoran masuk dalam pajak daerah. Pajak daerah merupakan faktor pendukung dari PAD. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2010-2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999:147).

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah memanfaatkan sumber data sekunder yang dipublikasikan oleh berbagai instansi terkait antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo
3. Literatur-literatur lainnya seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ekonomi

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskripsi adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Whitney (1960) berpendapat, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu, sehingga banyak ahli meamakan

metode ini dengan nama survei normatif (normatif survei). Dengan metode ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan memilah hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode ini juga dinamakan studi kasus (status study).

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar sehingga penelitian ini disebut juga survei normatif. Dalam metode ini juga dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antarfenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Perspektif waktu yang dijangkau, adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Metode penelitian *kuantitatif* merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:7).

3.3.2 Efektivitas

Efektivitas menurut Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil/realisasi) dengan *output* (target). *Outcome* (hasil/realisasi) merupakan suatu hasil yang telah dicapai, sedangkan *output* (target) merupakan suatu hasil atau rencana yang ingin dicapai. Dengan membandingkan realisasi dengan target maka dapat diketahui seberapa besar efektivitas variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber: Nurlan (2006:49)

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas.

Efektivitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Nurlan (2006:49)

3.3.3 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira:2012). Maka dapat diartikan bahwa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah adalah keterlibatan pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada beberapa variabel pembentuk pendapatan asli daerah, untuk mencari seberapa besar kontribusi suatu variabel pembentuk pendapatan asli daerah diperlukan sebuah rumus kontribusi. Rumus kontribusi bisa dihitung sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004:163)

Keterangan:

- P_n = Kontribusi
 QX = Realisasi Pembentuk PAD
 QY = Realisasi PAD
 N = Tahun (periode tertentu)

Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi.

Kontribusi	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)